# **DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

# **TUJUAN DLH**

- 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan
- 2. Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik
- 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan

# IDENTIFIKASI CSF CSF 1

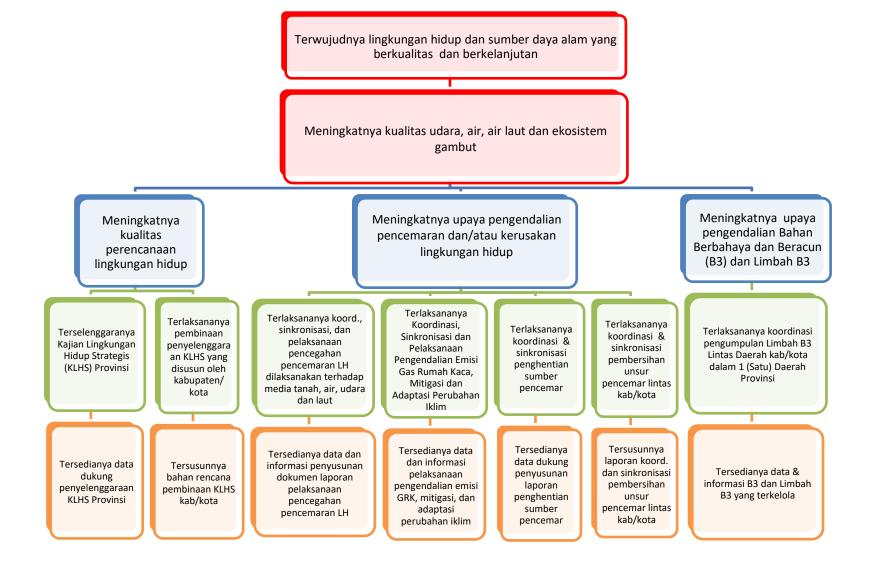
FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Menurunnya kualitas lingkungan	<ul> <li>Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan</li></ul>
hidup	ekosistem gambut

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	<ul> <li>Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup</li> <li>Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>Meningkatnya kualitas pendayagunaan laboratorium lingkungan</li> <li>Meningkatnya upaya pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3</li> <li>Meningkatnya upaya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin</li> </ul>
	PPLH  Meningkatnya pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH  Meningkatnya pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat  Meningkatnya upaya penanganan pengaduan lingkungan hidup  Meningkatnya upaya pengelolaan persampahan

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup	Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi  Tarkanananananananananananananananananana
	<ul> <li>Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota</li> </ul>
<ul> <li>Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> </ul>	<ul> <li>Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut</li> </ul>
	<ul> <li>Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</li> </ul>
	<ul> <li>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar</li> </ul>
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar lintas kab/kota
Meningkatnya upaya pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Terlaksananya koordinasi pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah kab/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Meningkatnya upaya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Terlaksananya fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH
	<ul> <li>Terlaksananya pengembangan kapasitas</li> <li>Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup</li> </ul>
	Terlaksananya pengawasan perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang PPLH
Meningkatnya pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA	<ul> <li>Terlaksananya pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</li> </ul>
yang terkait dengan PPLH	<ul> <li>Terlaksananya peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</li> </ul>
Meningkatnya pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Terlaksananya pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup
Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	<ul> <li>Terlaksananya penerapan sanksi administrasi yang dikenakan ke penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat yang menjadi kewenangan Provinsi</li> </ul>
	Terlaksananya pengelolaan penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi

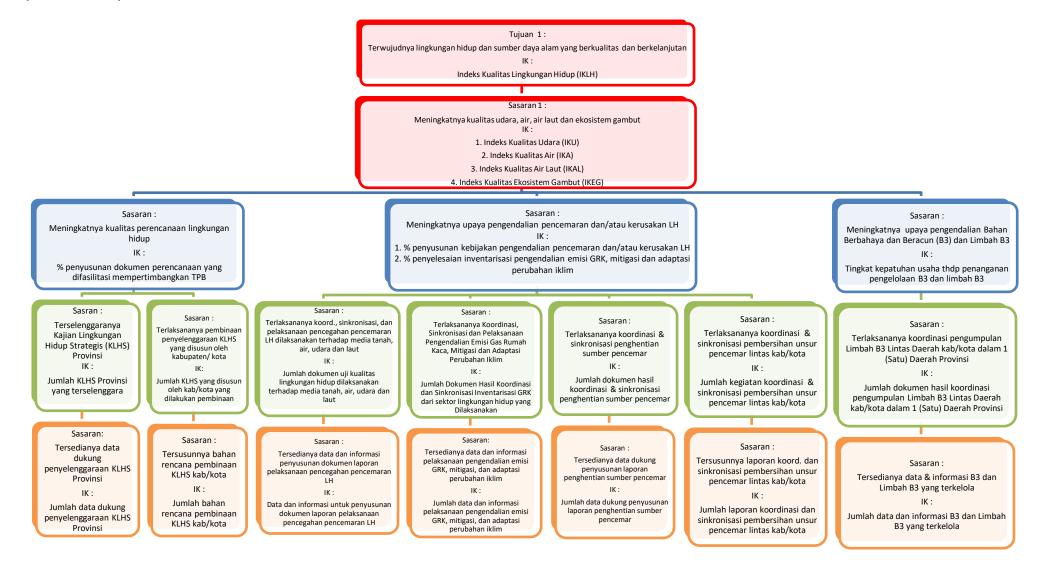
Meningkatnya pengelolaan persampahan
 Terlaksananya penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi

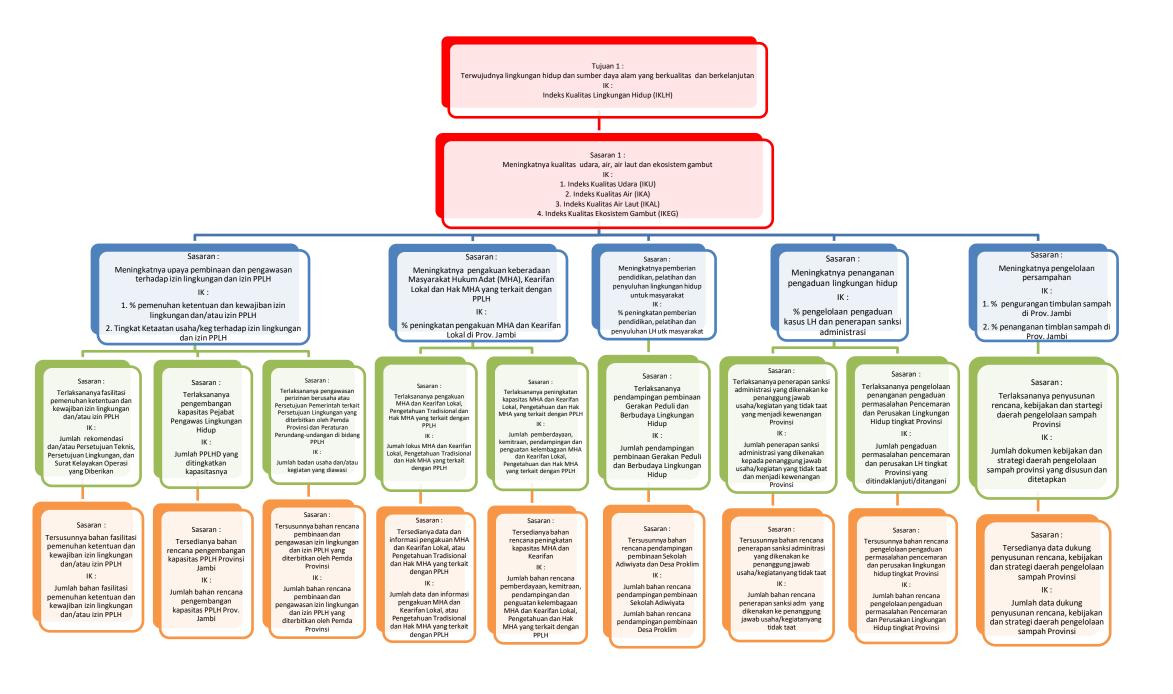
# CSF (TUJUAN DLH 1)



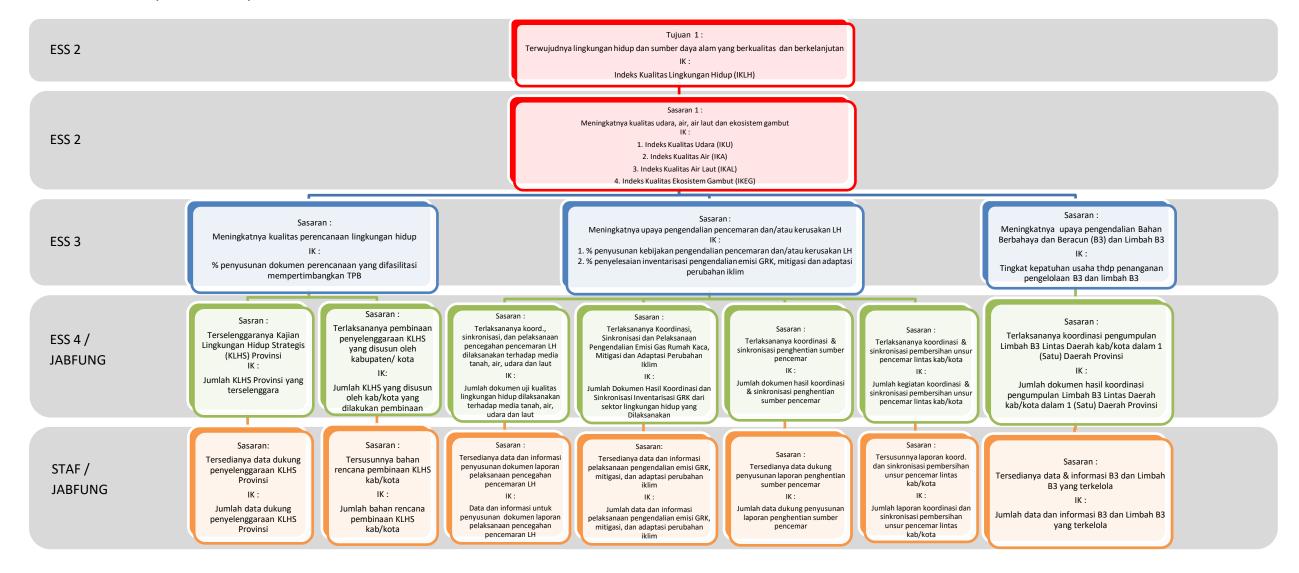
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut Meningkatnya pengakuan Meningkatnya Meningkatnya upaya pembinaan Meningkatnya keberadaan Masyarakat Meningkatnya pemberian pendidikan, dan pengawasan terhadap izin penanganan Hukum Adat (MHA), Kearifan pengelolaan pelatihan dan lingkungan dan izin PPLH pengaduan Lokal dan Hak MHA yang penyuluhan lingkungan persampahan lingkungan hidup hidup untuk masyarakat terkait dengan PPLH Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya peningkatan penerapan sanksi pengelolaan pengawasan perizinan Terlaksananya pengakuan MHA fasilitasi kapasitas MHA Terlaksananya berusaha atau administrasi yang penanganan Terlaksananya penyusunan pendampingan dan Kearifan Lokal, Persetujuan Pemerintah pemenuhan pengembangan dan Kearifan dikenakan ke pengaduan rencana, kebijakan dan pembinaan Gerakan Pengetahuan terkait Persetujuan ketentuan dan kapasitas Pejabat Lokal, penanggung jawab permasalahan startegi daerah pengelolaan Lingkungan yang Peduli dan Tradisional dan kewajiban izin Pengetahuan dan Pengawas diterbitkan oleh Pemda usaha/kegiatan yang Pencemaran dan sampah Provinsi Berbudaya Hak MHA yang Provinsi dan Peraturan Hak MHA yang lingkungan Lingkungan Hidup tidak taat yang Perusakan Lingkungan Hidup Perundang-undangan di terkait dengan dan/atau izin PPLH terkait dengan menjadi kewenangan Lingkungan Hidup bidang PPLH PPLH PPLH Provinsi tingkat Provinsi Tersusunnya Tersedianya data Tersusunnya bahan bahan rencana dan informasi Tersusunnya bahan Tersedianya Tersusunnya bahan pembinaan dan rencana pengakuan MHA Tersusunnya fasilitasi pemenuhan bahan rencana Tersedianya rencana penerapan pengelolaan pengawasan izin dan Kearifan Tersedianya data dukung bahan rencana ketentuan dan pengembangan bahan rencana sanksi adminitrasi pengaduan lingkungan dan Lokal, atau penyusunan rencana, pendampingan kewajiban izin kapasitas PPLH peningkatan yang dikenakan ke permasalahan izin PPLH yang Pengetahuan kebijakan dan strategi pembinaan lingkungan dan/atau Provinsi Jambi kapasitas MHA penanggung jawab diterbitkan oleh pencemaran dan Tradisional dan daerah pengelolaan Sekolah Adiwiyata izin PPLH dan Kearifan usaha/kegiatanyang perusakan Pemda Provinsi Hak MHA yang sampah Provinsi dan Desa Proklim tidak taat lingkungan hidup terkait dengan tingkat Provinsi PPLH

### **POHON KINERJA (TUJUAN DLH 1)**

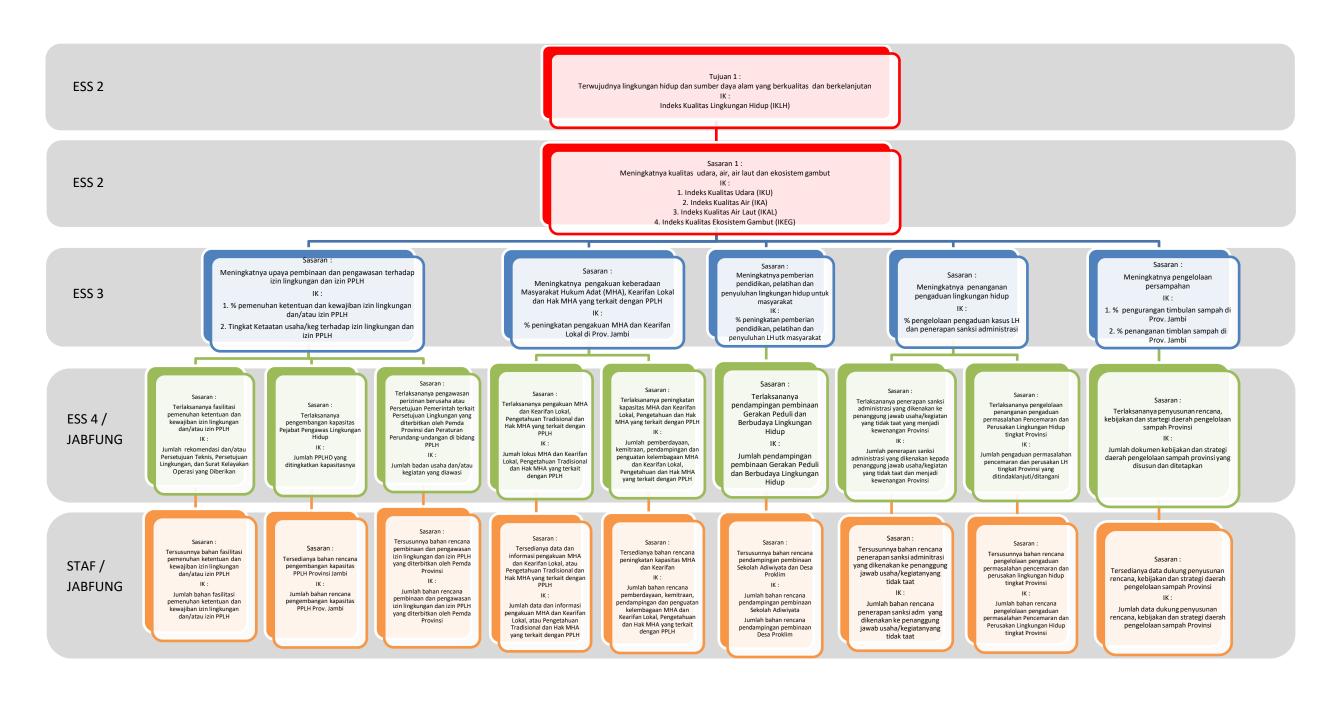




# **CASCADING (TUJUAN DLH 1)**



Sambungan CascadingTujuan DLH 1...



# CROSSCUTTING KINERJA

# CSF 1

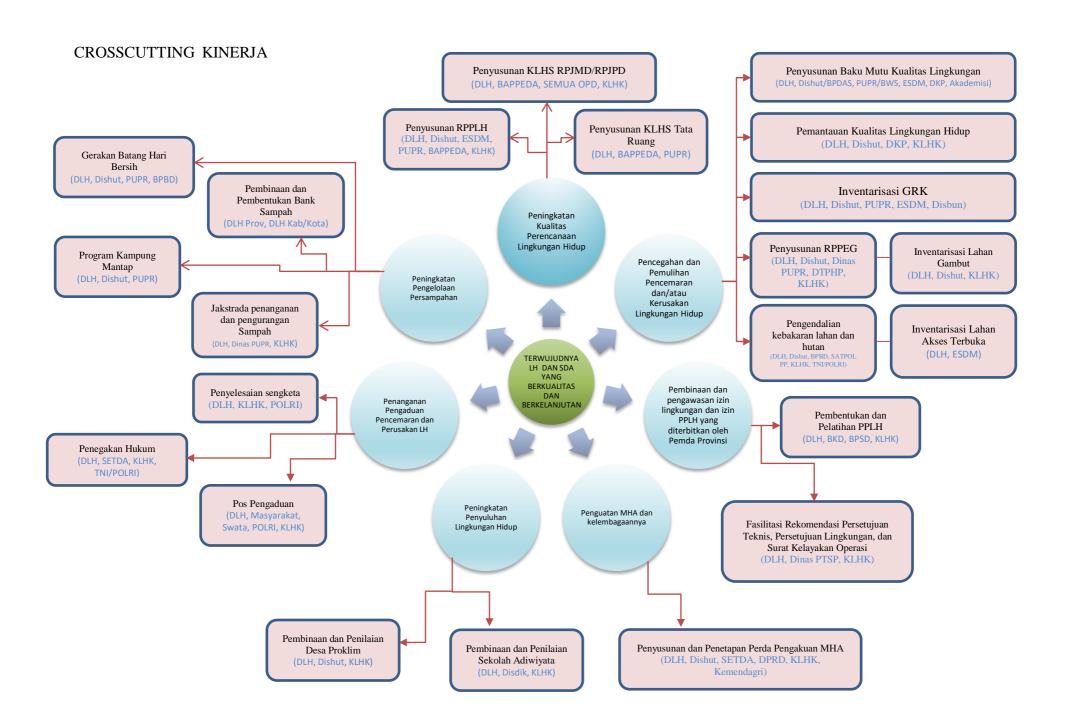
CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN	
Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan SDA Provinsi Jambi	<ul> <li>Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan</li> </ul>	

# CSF 2

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan	<ul> <li>Peningkatan Kualitas Perencanaan         Lingkungan Hidup</li> <li>Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran         dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan         dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda         Provinsi</li> <li>Penguatan MHA dan kelembagaannya</li> <li>Peningkatan Penyuluhan Lingkungan Hidup</li> <li>Penanganan Pengaduan Pencemaran dan         Perusakan LH</li> <li>Peningkatan Pengelolaan Persampahan</li> </ul>

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Peningkatan Kualitas Perencanaan	Penyusunan RPPLH
Lingkungan Hidup	Penyusunan KLHS RPJMD/RPJPD
	Penyusunan KLHS Tata Ruang
Pencegahan dan Pemulihan	Penyusunan Baku Mutu Kualitas Lingkungan
Pencemaran dan/atau Kerusakan	<ul> <li>Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup</li> </ul>
Lingkungan Hidup	Inventarisasi GRK
	Penyusunan RPPEG
	<ul> <li>Inventarisasi Lahan Gambut</li> </ul>
	Inventarisasi Lahan Akses Terbuka
	Pengendalian kebakaran lahan dan hutan
Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi	<ul> <li>Fasilitasi Rekomendasi Persetujuan Teknis,         Persetujuan Lingkungan, dan Surat         Kelayakan Operasi</li> <li>Pembentukan dan Pelatihan PPLH</li> </ul>
Penguatan MHA dan     kelembagaannya	Penyusunan dan Penetapan Perda     Pengakuan MHA
Peningkatan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata
Πααρ	Pembinaan dan Penilaian Desa Proklim

Penanganan Pengaduan     Pencemaran dan Perusakan LH	Pos Pengaduan
	Penyelesaian sengketa
	Penegakan Hukum
Peningkatan Pengelolaan     Persampahan	<ul> <li>Jakstrada penanganan dan pengurangan Sampah</li> </ul>
·	<ul> <li>Gerakan Batang Hari Bersih</li> </ul>
	Program Kampung Mantap
	<ul> <li>Pembinaan dan Pembentukan Bank Sampah</li> </ul>



# **DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI**

# **TUJUAN DLH**

- 1. Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan
- 2. Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik

# 2. Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik

# IDENTIFIKASI CSF TUJUAN DLH 2

# CSF 1:

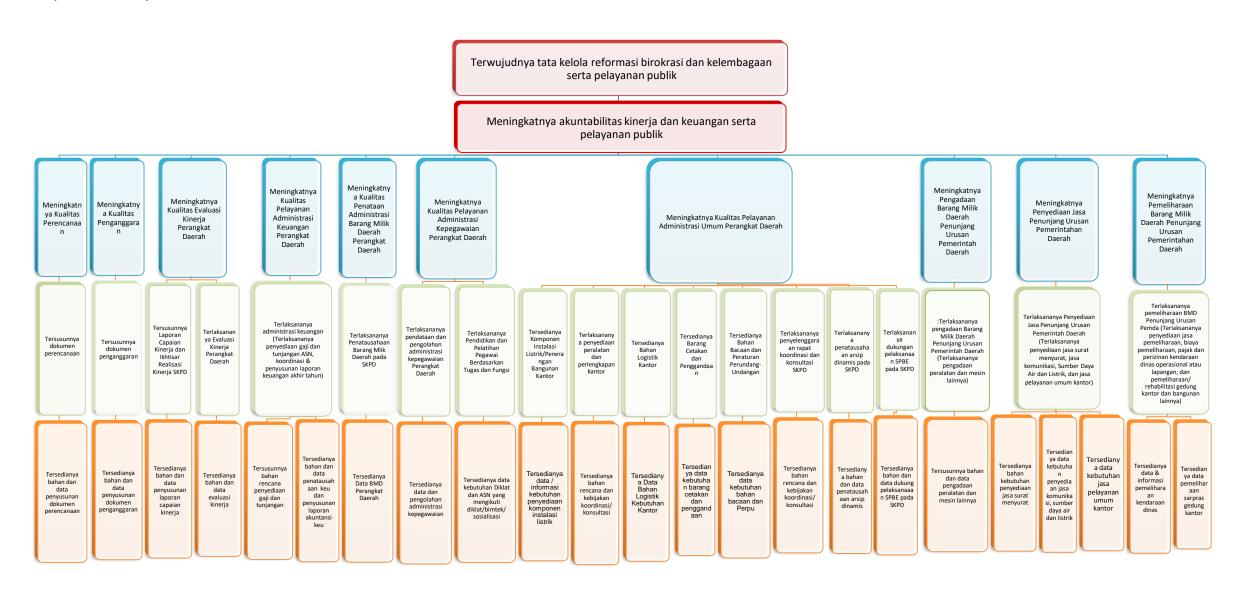
FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN	
<ul> <li>Rendahnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik</li> </ul>	<ul> <li>Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik</li> </ul>	

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan
keuangan serta pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Penganggaran
	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja     Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Penataan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah     Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang     Urusan Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik     Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan     Daerah

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN		
<ul> <li>Meningkatnya Kualitas Perencanaan</li> </ul>	Tersusunnya Dokumen Perencanaan     Perangkat Daerah		
<ul> <li>Meningkatnya Kualitas Penganggaran</li> </ul>	<ul> <li>Tersusunnya Dokumen Penganggaran (RKA dan DPA SKPD)</li> </ul>		
<ul> <li>Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat     Daerah		
Meningkatnya Kualitas Pelayana Administrasi Keuangan Perangka Daerah			
<ul> <li>Meningkatnya Kualitas Penataan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</li> </ul>			
Meningkatnya Kualitas Pelayana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<ul> <li>Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</li> </ul>		
	<ul> <li>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</li> </ul>		
<ul> <li>Meningkatnya Kualitas Pelayana Administrasi Umum Perangkat</li> </ul>	Tersedianya Komponen Instalasi     Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Daerah	<ul> <li>Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> </ul>		
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		
	<ul> <li>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan</li> </ul>		
	<ul> <li>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan</li> </ul>		
	<ul> <li>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</li> </ul>		
	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		
	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		
	Terlaksananya dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD		
Meningkatnya Pengadaan Barai Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan Barang Milik     Daerah Penunjang Urusan Pemerintah     Daerah (Terlaksananya pengadaan peralatan     dan mesin lainnya)		
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahar Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang     Urusan Pemerintah Daerah (Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan jasa pelayanan umum kantor)		

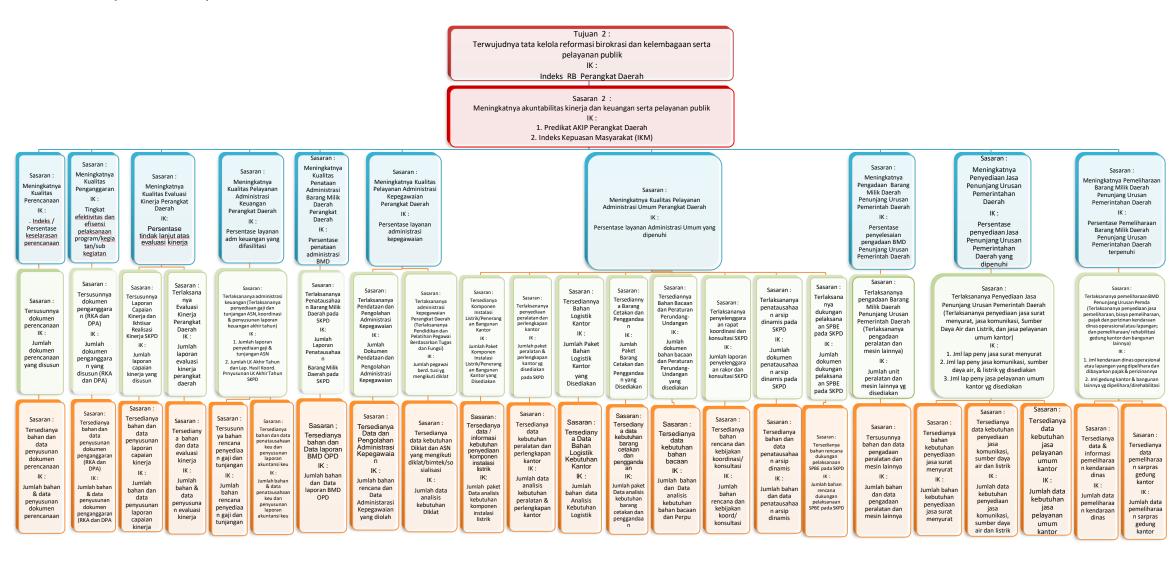
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya)
Meningkatnya kualitas pendayagunaan laboratorium lingkungan	<ul> <li>Terlaksananya perencanaan pengelolaan laboratorium, pelatihan bagi personil laboratorium, dan penambahan alat-alat laboratorium</li> <li>Terlaksananya pengelolaan administrasi dan keuangan (PAD) laboraorium lingkungan</li> <li>Terlaksananya pengujian di laboraorium lingkungan</li> </ul>

# CSF (TUJUAN DLH 2)



Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik Meningkatnya kualitas pendayagunaan laboratorium lingkungan Terlaksananya perencanaan pengelolaan laboratorium, pelatihan bagi personil laboratorium, dan penambahan alat-alat laboratorium Terlaksananya pengelolaan administrasi dan keuangan (PAD) Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan laboraorium lingkungan Tersedianya bahan dan data laporan pengelolaan administrasi dan keuangan (PAD) laboratorium lingkungan Tersedianya data dukung perencanaan perencanaan pengelolaan laboratorium, pelatihan bagi personil laboratorium, dan penambahan alat-alat laboratorium Tersedianya data dan informasi pengujian yang dilaksanakan di lanoratorium lingkungan

### **POHON KINERJA (TUJUAN DLH 2)**



#### Tujuan 2:

Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik

IK ·

Indeks RB Perangkat Daerah

Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik

IK:

1. Predikat AKIP Perangkat Daerah

2. % peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor uji laboratorium lingkungan

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

#### Sasaran:

Meningkatnya kualitas pendayagunaan laboratorium lingkungan

IK:

1. . % penyelesaian pengujian di laboratorium lingkungan

2. % penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor uji laboratorium lingkungan

#### Sasaran:

Terlaksananya pengelolaan administrasi dan keuangan (PAD) laboraorium lingkungan

IK:

Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan keuangan (PAD) laboratorium lingkungan

#### Sasaran:

Terlaksananya perencanaan pengelolaan laboratorium, pelatihan bagi personil laboratorium, dan penambahan alat-alat laboratorium

IK:

Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan laboratorium, pelatihan bagi personil laboratorium, dan penambahan alat-alat laboratorium

#### Sasaran:

Terlaksananya pengujian di laboraorium lingkungan

IK:

Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan

#### Sasaran:

Tersedianya bahan dan data laporan pengelolaan administrasi dan keuangan (PAD) laboratorium lingkungan

IK:

Jumlah bahan dan data laporan pengelolaan administrasi dan keuangan (PAD) laboratorium lingkungan

#### Sasaran:

Tersedianya data dukung perencanaan perencanaan pengelolaan laboratorium, pelatihan bagi personil laboratorium, dan penambahan alat-alat laboratorium

K :

Jumlah data dukung perencanaan pengelolaan laboratorium, pelatihan bagi personil laboratorium, dan penambahan alat-alat laboratorium

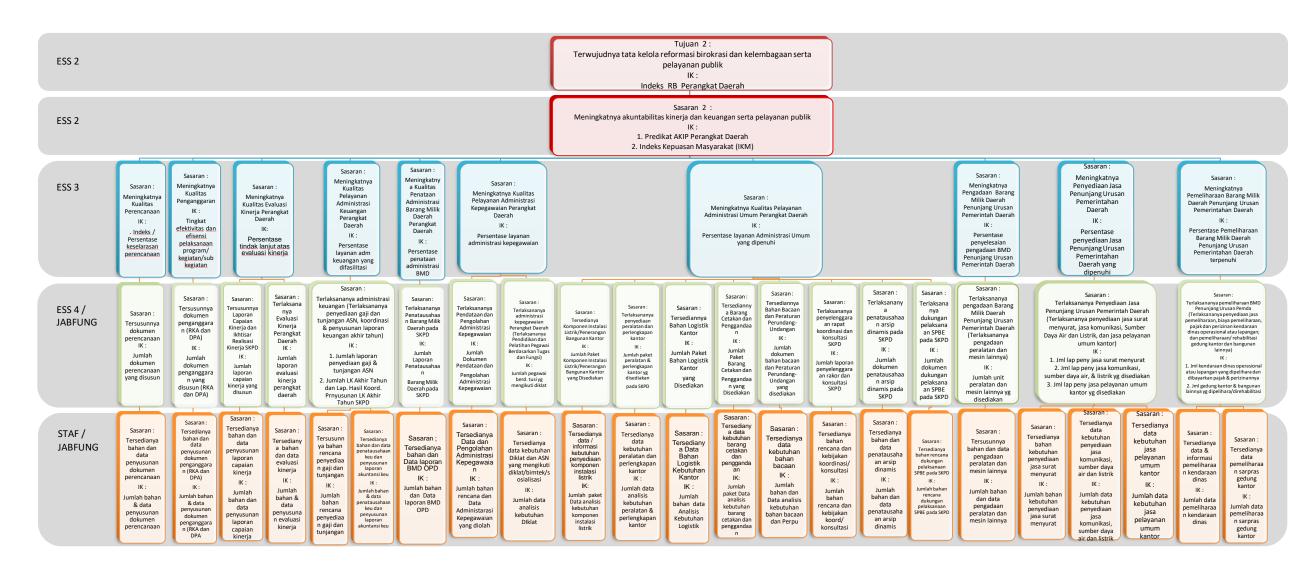
#### Sasaran:

Tersedianya data dan informasi pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan

IK:

Jumlah data dan informasi pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan

## **CASCADING KINERJA (TUJUAN DLH 2)**



	ESS 2	Те	Tujuan 2 : rwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan pu IK : Indeks RB Perangkat Daerah	ublik
	ESS 2	Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik IK:  1. Predikat AKIP Perangkat Daerah 2. % peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor uji laboratorium lingkungan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
	Sasaran :  Meningkatnya kualitas pendayagunaan laboratorium lingkungan  IK :  1 % penyelesaian pengujian di laboratorium lingkungan  2. % penerimaan Pendapatan Asli Daerah sektor uji laboratorium lingkungan			
ESS 4/ JFT	Sasaran : Terlaksananya pengelolaan administrasi dan keuangan (P laboraorium lingkungan IK : Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan keuangan (F laboratorium lingkungan		Sasaran : Terlaksananya perencanaan pengelolaan laboratorium, pelatihan bagi personil laboratorium, dan penambahan alat-alat laboratorium  IK : Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan laboratorium, pelatihan bagi personil laboratorium, dan penambahan alat-alat laboratorium	Sasaran : Terlaksananya pengujian di laboraorium lingkungan IK : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
STAF/ JFT	Sasaran : Tersedianya bahan dan data laporan pengelolaan administra keuangan (PAD) laboratorium lingkungan IK : Jumlah bahan dan data laporan pengelolaan administrasi keuangan (PAD) laboratorium lingkungan		Sasaran : Tersedianya data dukung perencanaan perencanaan pengelolaan laboratorium, pelatihan bagi personil laboratorium, dan penambahan alat-alat laboratorium  IK : Jumlah data dukung perencanaan pengelolaan laboratorium, pelatihan bagi personil laboratorium, dan penambahan alat-alat laboratorium	Sasaran: Tersedianya data dan informasi pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan IK : Jumlah data dan informasi pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan

# CROSSCUTTING KINERJA (TUJUAN DLH 2)

# 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA REFORMASI BIROKRASI DAN KELEMBAGAAN SERTA PELAYANAN PUBLIK

# Identifikasi CSF

# CSF 1

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Rendahnya kualitas akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
dan keuangan serta pelayanan publik	serta pelayanan publik

# CSF 2

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Akuntabilitas Kinerja
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja
	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja
	Meningkkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Internal
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik
	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pelayanan Publik
	Meningkatnya Monitoring Implementasi Pelayanan Pubik

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul> <li>Meningkatnya Kualitas Kebijakan Akuntabilitas Kinerja</li> </ul>	Tersusunnya Kebijakan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berbasis kinerja
	Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja
Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	Terlaksananya pengukuran capaian kinerja secara berkala
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Tersusunnya Laporan Kinerja mempedomani Peraturan     Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014
<ul> <li>Meningkkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Internal</li> </ul>	<ul> <li>Terlaksananya evaluasi kinerja internal secara berkala yang berdampak pada capaian kinerja</li> </ul>
<ul> <li>Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik</li> </ul>	<ul> <li>Tersusunnya Kebijakan Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Proses Bisnis, SOP, Standar Pelayanan, dsb)</li> </ul>
<ul> <li>Meningkatnya Kualitas Implementasi Pelayanan Publik</li> </ul>	Tersusunnya Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

- Meningkatnya Monitoring dan Implementasi Pelayanan Pubik
- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelayanan Publik

#### **CROSSCUTTING KINERJA (TUJUAN DLH 2)** Tersusunnya Kebijakan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah **DINAS LH, BIRO ORGANISASI,** BAPPEDA, INSPEKTORAT, Meningkatnya Kualitas DISKOMINFO Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Tersusunnya Kebijakan Pelayanan Meningkatnya Kualitas Tersusunnya Dokumen Publik Perangkat Daerah (Proses Kebijakan Pelayanan Perencanaan Perangkat Daerah Bisnis, SOP, Standar Pelayanan, dsb) DINAS LH, BIRO ORGANISASI, BIRO berbasis kinerja **Publik HUKUM, OMBUDSMAN** DINAS LH, BAPPEDA, BIRO **ORGANISASI** Meningkatnya **Kualitas Perencanaan** Tersusunnya Dokumen Kinerja **TERWUJUDNYA** Penganggaran Perangkat Daerah **TATA KELOLA** berbasis kinerja Tersusunnya Laporan Hasil Meningkatnya Kualitas **REFORMASI DINAS LH, BAPPEDA, BPKPD** Survei Kepuasan Implementasi Pelayanan **BIROKRASI DAN** Masyarakat Publik **KELEMBAGAAN DINAS LH, BIRO ORGANISASI SERTA** Meningkatnya Terlaksananya pengukuran **PELAYANAN** capaian kinerja secara berkala пприи **Kualitas Pengukuran** DINAS LH, BAPPEDA, BIRO Kinerja **ORGANISASI, DINAS KOMINFO** Terlaksananya Monitoring Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Implementasi dan Implementasi Pelayanan Publik Tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pubik DINAS LH, BIRO ORGANISASI, mempedomani Peraturan Menteri **OMBUDSMAN** Pelaporan Kinerja PANRB No. 53 Tahun 2014 **DINAS LH, BIRO ORGANISASI** Terlaksananya evaluasi kinerja Meningkkatnya Kualitas

**Evaluasi Kinerja Internal** 

internal secara berkala yang

berdampak pada capaian kinerja
DINAS LH, INSPEKTORAT